

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2019-2024

Dhea Putri Fatmayani¹, Ardan Gani Asalam²

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia,

dpfatmayani@student.telkomuniversity.ac.id

²Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, ganigani@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Desentralisasi fiskal memberi otoritas kepada pemerintah daerah agar mengatur keuangan secara mandiri dalam rangka meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik. Salah satu tolok ukur keberhasilannya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kota Medan, pusat ekonomi di Sumatera Utara memiliki prospek PAD yang besar, tapi ternyata realisasinya belum maksimal. Penelitian ini menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kota Medan. Metode yang dipakai adalah kuantitatif dengan pendekatan regresi linear berganda berdasarkan data sekunder dari tahun 2019–2024 yang diperoleh melalui laporan realisasi anggaran dengan jumlah 72 sampel. Hasil menampilkan pajak dan retribusi daerah berkontribusi dengan positif dan sig. terhadap PAD, sedangkan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak ada pengaruh yang berarti. Temuan ini menyoroti pentingnya peningkatan kepatuhan pajak serta evaluasi kinerja BUMD guna mengoptimalkan penerimaan daerah. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat implementasi desentralisasi fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.

Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Kontribusi, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah.

Abstract

Fiscal decentralization gives local governments the authority to manage finances independently in order to improve the efficiency and accountability of public services. One measure of its success is local own-source revenue (PAD). Medan City as the economic center in North Sumatra has a large PAD potential, but its realization has not been maximized. This study analyzes the effect of local taxes, local levies, and management of separated local assets on PAD of Medan City. The method used is quantitative with a multiple linear regression approach based on secondary data from 2019-2024 obtained through the budget realization report with a total of 72. The results reveal that local taxes and levies contribute positively and significantly to PAD, while the management of separated local assets does not show a meaningful influence. These findings highlight the importance of improving tax compliance as well as evaluating the performance of BUMDs to optimize regional revenue. These efforts are expected to strengthen the implementation of fiscal decentralization and improve the welfare of the people of Medan City.

Keywords: Contribution, Fiscal Decentralization, Regional Original Revenue, Regional Retribution, Regional Taxes, Results of Management of Separated Regional Wealth

I. PENDAHULUAN

Kota Medan merupakan pusat ekonomi strategis di wilayah barat Indonesia dan resmi menjadi kota administratif berdasarkan UU No. 8 Tahun 1956. Pada 2023, PAD Kota Medan mencapai Rp2,44 triliun, tertinggi di Sumatera Utara, dengan sumber utama dari pajak daerah (PD), retribusi daerah (RB), hasil pengelolaan kekayaan daerah (HKDD) dan lain-lain pendapatan yang sah. Meski ada kenaikan selama 2019–2023, realisasi PAD belum optimal. Pajak mendominasi, tetapi terkendala rendahnya kepatuhan dan lemahnya pengawasan (Said, 2023). Retribusi dan kontribusi BUMD juga masih rendah, masing-masing hanya sekitar 4–6% dan 1% (Romulo, 2024) (Molana, 2024).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh ketiga komponen tersebut terhadap PAD Kota Medan dalam konteks evaluasi kebijakan fiskal daerah.

II. TINJAUAN LITERATUR

A. Teori Terkait dengan Penelitian dan Penelitian Terdahulu

Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan pemasukan yang berasal aktivitas ekonomi daerah yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan. UU No. 1 Tahun 2022 menyebutkan, PAD terdiri atas pajak, retribusi, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan lainnya yang sah. PAD mencerminkan kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Pajak Daerah

UU No. 1 Tahun 2022, PD ialah kewajiban yang bersifat memaksa bagi individu maupun badan guna mendukung pembangunan dan layanan publik. Dalam penelitiann ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Yasser & Widajantie (2023) kontribusi dari realisasi pajak daerah terhadap penerimaan PAD dihitung se,bagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}}$$

1. Retribusi Daerah

UU No. 1 Tahun 2022, RB ialah pungutan dari layanan atau izin yang diberikan pemerintah, bersifat wajib dan memberi manfaat langsung. Dalam peneltian ini, kontribusi penerimaan retribusi daerah sebagaimana yang disebutkan oleh Hingide et al. (2023) dan Suprpto & Purbowati (2024) dirumuskan sebaga,i berikut:

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}}$$

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

HKDD ialah penerimaan dari aset daerah terutama ber sumber dari pengasihan modal pada BUMD, BUMN, perusahaan swasta, atau kelompok usaha masyarakat (UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah). Di penelitian ini, kontribusi penerimaan HKDD terhadap PAD menurut Ardiyanti et al. (2023) Nugraha & Mudid (2024) dan Hingide et al. (2023) dihitung sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi HKDD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan HKDD}}{\text{Realisasi PAD}}$$

Kerangka Pemikiran

3. Pengaruh Pajak Terhadap PAD

Desentralisasi menuntut kemandirian fiskal pemeritah daerah agar mendukung kemajuan masyarkat publik. Upaya meningkatkan kapasitas fiskal dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak melalui perbaikan sistem pemungutan, pengawasan yang ketat, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak (Rahayu et al., 2016).

H1 : PD Berpengaruh Positif Terhadap PAD

4. Pengaruh Retribusi Terhadap PAD

Desentralisasi fiskal memberikan wewenang bagi daerah untuk menggali penerimaan sendiri sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan publik sebagai dasar pemungutan retrubusi. Dalam hal ini, retribusi menjadi alat ukur penting bagi efektivitas otonomi daerah, karena menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhannya melalui pelayanan yang diselenggarakan secara mandiri (Hana & Sunarti, 2022).

H2 : RB Berpengaruh Positif Terhadap PAD

5. Pengaruh HKDD Terhadap PAD

Prinsip desentralisasi menggarisbawahi bahwa daerah tidak hanya perlu diberikan kewenangan, tetapi juga dituntut memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya dan kekayaan yang dimilikinya secara mandiri serta penuh tanggung jawab. Dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal, pembentukan badan usaha milik daerah menjadi salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh (Firdaus et al., 2022)

H3 : HKDD Dipisahkan Berpengaruh Positif Terhadap PAD

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kuantitatif deskriptif guna mengkaji PAD Kota Medan periode 2019–2024, yang mencakup PD, RD, dan HKDD. Seluruh data dianalisis sebagai sampel total melalui teknik sampling jenuh (Sugiyono, 2021), berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bulanan sebanyak 72 observasi. Metode regresi linier berganda dipakai agar mengidentifikasi pengaruh tiap variabel terhadap PAD.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Ket. :

Y = Variabel dependen, (PAD)

X = Variabel Bebas, meliputi :

- X₁ = PD

- X₂ = RB

- X₃ = HKDD

a = Konstanta

b = Koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas

e = Kesalahan (*error*)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	72	.65	.96	.8266	.08686
Retribusi Daerah	72	.01	.30	.1429	.07617
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	72	.00	.12	.0484	.02694
Pendapatan Asli Daerah (Rp)	72	72250859680	425833933362	176205624459.34	81599452378.321
Valid N (listwise)	72				

Hasil statistik deskriptif menjelaskan bahwa keempat variabel PAD, PD, RB, dan HKDD mengalami pergerakan data yang relatif stabil sepanjang 2019 hingga 2024. Seluruh variabel cenderung berada di sekitar nilai rata-rata tanpa menunjukkan lonjakan ekstrem atau variasi besar antar tahun, sehingga menggambarkan konsistensi dalam realisasi dan distribusi datanya selama periode tersebut.

B. Uji Asumsi

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.16224404
Most Extreme Differences	Absolute	.098
	Positive	.098
	Negative	-.069
Test Statistic		.098
Asymp. Sig. (2-tailed)		.087 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil uji normalitas yaitu nilai sig. sebesar 0,087. Karena angka ini melebihi batas signifikan 0,05, maka bisa dikatakan data yang dipakai di penelitian ini penyebarannya normal.

2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10,890	,224		48,569	,000		
	Pajak Daerah	,509	,847	,124	,601	,003	,253	1,948
	Retribusi Daerah	,389	,134	,603	2,899	,005	,250	1,005
	Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-,063	,072	-,092	-,869	,388	,968	1,033

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Hasil uji multikol menmpilkan angka VIF pada PD, RB, dan HKDD masing-masing berada di bawah angka 10, serta nilai *tolerance* dari ketiganya melebihi 0,10. Temuan ini mengindikasikan bahwa tidak ada kaitan linear yang kuat antarvariabel bebas, jadi model regresi I yang di pakai bebas dari isu multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,679 ^a	,461	,437	,16584	1,637

a. Predictors: (Constant), Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Hasil uji autokorelasi, didapat nilai *Durbin-Watson* (DW) sebesar 1,637. Angka tersebut berada dalam rentang antara -2 hingga 2, yang menunjukkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala autokorelasi.

C. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,890	,224		48,569	,000
	Pajak Daerah	,509	,847	,124	,601	,003
	Retribusi Daerah	,389	,134	,603	2,899	,005
	Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-,063	,072	-,092	-,869	,388

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

$$Y = 10,890 + 0,509 X_1 + 0,389 X_2 - 0,063 X_3 + e$$

Hasil regresi linier berganda, konstanta dengan 10,890 mengartikan bahwa ketika seluruh variabel bebas bernilai nol, nilai PAD tetap sebesar 10,890. Koefisien pajak daerah sebesar 0,509 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan pajak daerah satu satuan akan meningkatkan PAD sebesar 0,509, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Demikian pula, koefisien retribusi daerah sebesar 0,389 menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan pada retribusi akan menaikkan PAD sebesar 0,389. Sebaliknya, koefisien hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar -0,063 mengindikasikan adanya penurunan PAD sebesar 0,063 untuk setiap peningkatan satu satuan dalam variabel tersebut.

D. Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,679 ^a	,462	,437	,16584

a. Predictors: (Constant), Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Rp)

Nilai *adjusted R square* diperoleh 0,437, ialah memiliki makna dan arti sekitar 43,7% variasi pada PAD dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Sementara itu, sisa nya yaitu 56,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain nya yang tiada di bahas di penelitian ini.

2. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,699	3	,233	8,466	,000 ^b
Residual	1,843	68	,028		
Total	2,541	71			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Rp)

b. Predictors: (Constant), Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

Uji simultan (F) menampilkan nilai sig. sebesar 0,000 yang lebih rendah dari 0,05, yang bermakna secara simultan variabel tidak terikat berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Medan.

3. Uji Parsial (Uji t)

Secara parsial (uji t), PD dan RB memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap PAD pada periode 2019–2024, karena nilai sig. berada di bawah 0,05. Sebaliknya, HKDD tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dikarenakan nilai sig. lebih dari 0,05.

E. Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap PAD Kota Medan Tahun 2019-2014

Hasil uji simultan menampilkan bahwa bebas secara bersamaan memiliki pengaruh sig. terhadap PAD Kota Medan, perolehan angka sig. 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menguatkan bahwa hipotesis penelitian diterima. Selain itu, melalui analisis koefisien determinasi, diperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0,437, yang berarti bahwa 43,7% perubahan PAD dijelaskan oleh ketiga tersebut, sedangkan sisanya 56,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

2. Pengaruh Pajak Terhadap PAD Kota Medan Tahun 2019-2024

Hasil analisis parsial pengaruh PD berdasarkan tabel menunjukkan nilai sig. 0,003 yang berada di bawah ketentuan angka 0,05. Temuan ini mendeklarasikan PD memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap PAD. Selama rentang tahun 2019–2024, menunjukkan bahwa sebagian besar data dengan PD di atas rata-rata juga memiliki PAD yang tinggi, dan sebaliknya data dengan pajak daerah yang rendah berbanding lurus dengan PAD yang rendah. Hal ini mengindikasikan korelasi yang kuat antara penerimaan pajak dan PAD. Pajak daerah menjadi sumber utama penerimaan dan instrumen penting dalam mendukung kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan (Budiharjo et al., 2025)

3. Pengaruh Retribusi Terhadap PAD Kota Medan Tahun 2019-2024

Mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022, retribusi ialah kutipan yang dikenakan pemerintah daerah yang diakibatkan layanan dan izin kepada masyarakat atau badan usaha. Berdasarkan hasil analisis

parsial, nilai sig. yang diperoleh ialah 0,005, yang lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan RB memiliki pengaruh positif dan sig. terhadap peningkatan PAD di Kota Medan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan retribusi secara langsung mendorong kenaikan PAD. Efisiensi pemungutan dan pengelolaan retribusi mencerminkan kinerja pelayanan publik yang baik. Data juga menunjukkan kecenderungan hubungan positif antara rendahnya retribusi dan rendahnya PAD selama periode pengamatan.

4. Pengaruh HKDD Terhadap PAD Kota Medan Tahun 2019-2024

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, HKDD berasal dari labm BUMD dan kerja sama dengan pihak ketiga. Hasil uji parsial menunjukkan angka sig. 0,388 lebih rendah dari 0,05, akibatnya tidak berpengaruh sig. terhadap PAD Kota Medan. Kontribusi variabel ini terhadap PAD sangat kecil, hanya sekitar 1%, bahkan pada Januari 2019 tercatat nol rupiah. Rendahnya kontribusi ini disebabkan oleh kinerja BUMD yang belum optimal serta kurangnya inovasi usaha. Dengan demikian, meskipun memiliki potensi, hasil kekayaan daerah belum mampu meningkatkan kapasitas fiskal secara nyata.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh dari variabel PD, RB, dan HKDD terhadap variabel PAD Kota Medan selama tahun 2019-2024 dengan menggunakan regresi linier berganda dari 72 sampel selama 6 tahun. Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa PD, RD dan HKDD punya pengaruh terhadap PAD Kota Medan. Secara parsial, PD dan RB memiliki pengaruh sig. secara positif sedangkan HKDD tidak berpengaruh sig.

B. Saran

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa ketersediaan data sekunder. Awalnya dirancang menggunakan data tahun 2018–2024 sebanyak 84 observasi, namun hanya tersedia data periode 2019–2024 sehingga analisis terbatas pada 72 sampel. Keterbatasan ini dapat memengaruhi kelengkapan analisis dan generalisasi hasil. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menjalin kerja sama institusional guna memperoleh data yang lebih lengkap dan berjangka panjang. Selain itu, peneliti juga disarankan untuk menambahkan variabel lain dari literatur ilmiah, buku, atau observasi lapangan guna memperkaya analisis dan mengikuti perkembangan terbaru dalam studi Pendapatan Asli Daerah.

2. Aspek Praktisi

Pemerintah Kota Medan diharapkan meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah melalui perluasan objek, efisiensi pemungutan, serta penguatan pengawasan dan penegakan aturan. Edukasi kepada masyarakat juga penting untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Permadi & Asalam, 2022). Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) disarankan untuk mengoptimalkan sumber PAD utama, khususnya pajak dan retribusi, dengan memperbaiki pendataan, pengawasan, serta sistem pengarsipan. Ketersediaan data yang lengkap akan menunjang transparansi dan perencanaan keuangan jangka panjang. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi sangat dibutuhkan bagi peningkatan PAD dan pembangunan daerah (Silalahi & Asalam, 2022).

REFERENSI

- Ardiyanti, D. A., Abbas, D. S., Yahawi, S. H., & Hendriyanto, S. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, Vol.2, No.4.
- Budiharjo, R., Pratomo, D., & Wahjoe Hapsari, D. (2025). *Local Government Financial Performance: Good Governance, the Effectiveness Internal Control and Competence*. 10(1), 125–138.
- Firdaus, M. R., Anwar, H. S., & Malik, I. (2022). *Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2017-2019 Di Kota Bandung*.
- Hana, C., & Sunarti, D. (2022). Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Tradisional Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI BISNIS*.
- Hingide, S., Kawung, G. M. V., & Maramis, M. Th. B. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmu Efisiensi*, 23 No 9.
- Molana, D. H. (2024). *PKS Soroti 3 BUMD Tak Dongkrak PAD Medan, Bobby Minta Direksi Berinovasi*. <https://news.detik.com/berita/d-5744336/pks-soroti-3-bumd-tak-dongkrak-pad-medan-bobby-minta-direksi-berinovasi>

- Nugraha, R. S., & Mudid, D. (2024). Pengaruh Kontribusi Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang Periode 2018 - 2022). *JEMAP : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Dan Perpajakan*.
- Permadi, B. A., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020). *Jurnal Ilmiah MEA*, 6 No 3.
- Rahayu, S., Raviyanti, A. A., & Mahardika, D. P. K. (2016). *Local Government Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure to Human Development Index (HDI) in Papua, Indonesia. Advanced Science Letters*, 22(12), 4077–4081. <https://doi.org/10.1166/asl.2016.8199>
- Romulo. (2024). *Pendapatan Retribusi Parkir Alami Penurunan, Dishub Medan Akan Revisi Perwal Parkir Berlangganan*. Jurnalx.Co.Id.
- Said, M. (2023). *Bapenda Kota Medan menjemput tunggakan pajak hotel dan restoran*. ANTARA Kantor Berita Indonesia.
- Silalahi, V. D. T. P., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 273–282. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2353>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Suprpto, S., & Purbowati, R. (2024). Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.59837/jan.v2i1.28>
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (n.d.).
- Yasser, H., & Widajantie, T. D. (2023). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*.